

BAB III

PERJALANAN REFERENDUM KEANGGOTAAN INGGRIS DI UNI EROPA TAHUN 2016

“Over 33 million people from England, Scotland, Wales, Northern Ireland and Gibraltar have all had their say. We should be proud of the fact that in these islands we trust the people with these big decisions” David Cameron (Fortune, 2016)

Pilihan masyarakat Inggris untuk keluar dari Uni Eropa merupakan sebuah cerminan dari alokasi kekuasaan yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya melalui jalur referendum. Meskipun masyarakat yang menjadi penentu terkait masa depan Inggris tanpa Uni Eropa, dinamika politik internal dan eksternal ikut mempengaruhi terkabulnya wacana referendum menjadi kenyataan.

A. Tuntutan Domestik Inggris Terkait Pelaksanaan Referendum 2016

Referendum yang dilakukan oleh Inggris untuk menentukan nasib keanggotaan mereka dalam Uni Eropa pada tanggal 23 Juni 2016 lalu merupakan sebuah momen bersejarah dalam rekam jejak negara tersebut dalam pentas internasional. Istilah lain yang digunakan oleh media massa dan diadopsi ulang oleh masyarakat untuk menggambarkan referendum ini adalah *Brexit* yang merupakan kepanjangan dari *British* dan *Exit*. Istilah yang sudah dikenal luas sejak tahun 2012

ini merupakan fakta bahwa wacana referendum ini telah lama dipertimbangkan dan menjadi bahan kajian oleh berbagai pihak di Inggris maupun di Uni Eropa.

Pada tahun 2011, pasca pertemuan antara negara-negara anggota Uni Eropa terkait adanya wacana untuk mengintegrasikan pengaturan anggaran fiskal demi mengatasi krisis zona euro memperoleh penolakan yang sangat besar dari anggota Partai Konservatif di Inggris. Hal ini memicu adanya keinginan dari anggota parlemen untuk mengajukan renegotiasi hubungan antara Inggris dan Uni Eropa yang dimanifestasikan dalam petisi yang ditandatangani tidak kurang dari 100.000 orang termasuk anggota Parlemen Inggris dan anggota Parlemen Uni Eropa. Selain itu, anggota Partai Konservatif berusaha untuk menguatkan posisi dengan cara menggaet anggota parlemen Partai Buruh yang memiliki pemikiran sama. Bill Cash, salah satu anggota parlemen dari Partai Konservatif berpikir lebih visioner dengan terang-terangan menyatakan bahwa referendum terkait keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa harus dilakukan dan masyarakat harus menjadi pihak yang menentukannya.

Namun, Perdana Menteri David Cameron menentang tuntutan referendum keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa tersebut. Ia kemudian berusaha meredam kontroversi ini dengan melakukan negosiasi dengan Brussel untuk memperoleh hasil yang cukup memuaskan bagi Inggris. Perdana Menteri ini tidak menggubris tuntutan dari anggota parlemen tersebut dengan mengatakan bahwa “negosiasi dengan Uni Eropa berjalan sesuai dengan rencana” (Watt, 2012).

Setahun kemudian, anggota parlemen kembali meradang dan kali ini terkait dengan isu yang sama, krisis di zona euro. Tuntutan untuk melakukan renegotiasi hubungan kembali muncul di permukaan dan lagi-lagi Perdana Menteri David Cameron tidak menggubris tuntutan tersebut meskipun ia tidak menampik adanya kemungkinan referendum di masa yang akan datang ketika stabilitas politik antara Inggris dan Brussel sudah tercapai. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Cameron di media masa *The Telegraph*, ia menulis bahwa masyarakat Inggris harus benar-benar paham mengenai apa yang diinginkan dalam skema hubungan negaranya dengan Uni Eropa sebelum melakukan pembahasan yang lebih ekstensif terkait referendum. Secara eksplisit, artikel tersebut juga menyatakan bahwa Cameron akan mempertimbangkan penyelenggaraan referendum pada waktu yang tepat (Cameron, David Cameron: We need to be clear about the best way of getting what is best for Britain, 2012). Meskipun begitu, pada pertemuan dengan *House of Commons*, Cameron secara tegas menyuarakan pendapatnya dengan memberikan dukungan terhadap keanggotaan Inggris di Uni Eropa dengan menyatakan, "banyak pihak yang menginginkan referendum saat ini. Saya tidak setuju karena saya tidak percaya bahwa keluar dari Uni Eropa merupakan keputusan terbaik bagi Inggris" (Telegraph, 2012).

Nigel Farage, pimpinan partai *United Kingdom Independence Party* (UKIP) yang *euro sceptic* menyerang Cameron dengan menyatakan bahwa tidak akan pernah ada 'waktu yang tepat' untuk melakukan referendum bagi Perdana Menteri tersebut. Ia mengusulkan bahwa Cameron harus menyelenggarakan debat terbuka untuk memetakan argumen pihak-pihak yang menginginkan Inggris dalam Uni

Eropa. Sementara itu, adanya pertentangan sengit dalam dinamika perpolitikan Inggris juga menyebabkan adanya persepsi *eurocepticm* yang semakin di kalangan masyarakat Inggris pada masa itu. Berdasarkan survei yang dilansir oleh firma *YouGov* memperlihatkan bahwa pada periode Juni 2011, 48% masyarakat cenderung memilih untuk keluar dari Uni Eropa berbanding dengan 31% masyarakat yang memilih untuk tetap (Kellner, 2012).

Pada Januari 2013, Perdana Menteri David Cameron berjanji akan menyelenggarakan referendum terkait dengan keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa apabila Partai Konservatif memenangkan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Menjelang waktu penyelenggaraan pemilu tersebut, pemerintah akan melakukan negosiasi dengan Dewan Uni Eropa untuk memperoleh mekanisme kerjasama yang lebih menguntungkan bagi Inggris.

Gagasan referendum yang dilontarkan oleh David Cameron ini menerima respon yang beraneka ragam dari berbagai pihak. Pemimpin Partai Buruh pada periode tersebut, Ed Miliband, menyatakan bahwa iming-iming referendum ini digunakan untuk memenangkan pemilu akibat kekhawatiran Cameron dengan popularitas partai *UK Independent Party* (UKIP) yang semakin menanjak dan mengancam posisi Partai Konservatif. UKIP sebagai partai *euroceptic* tersebut memang memiliki basis dukungan masyarakat yang terus berkembang selama sepuluh tahun terakhir ini dan terus menerus mempromosikan oposisinya terkait dengan integrasi Uni Eropa.

Pada tahun 2004, partai ini mencapai posisi ketiga pada pemilihan umum parlemen Uni Eropa dengan memperoleh voting sebesar 16.1% dan berhasil mengamankan 12 kursi di parlemen (BBC, European Election: United Kingdom Result, 2004). Hal ini merupakan fenomena yang dianggap cukup mengkhawatirkan ketika partai *euroseptic* berada dalam sebuah parlemen organisasi supranasional yang prinsipnya sama sekali bertolak belakang dengan integrasi yang diperjuangkan. Diangkatnya Nigel Farage sebagai pimpinan partai pada tahun 2006 memberikan UKIP semangat baru dalam menyuarakan visi dan misi partai tersebut. Pada pemilihan parlemen Uni Eropa pada tahun 2009, partai ini berhasil menarik pemilih sebesar 2.5 milyar dan mengamankan 13 kursi di parlemen tepat dibawah Partai Konservatif yang berada di urutan pertama (BBC, European Election 2009: UK Results, 2009). Empat tahun yang lalu, UKIP diperhitungkan sebagai partai yang dapat dikategorikan sebagai status sebagai partai besar oleh *Ofcom*, sebuah regulator komunikasi di Inggris (Ofcom, 2015). Pada saat itu, UKIP memenangkan pemilu dengan persentase sebesar 27.49% mengalahkan partai besar seperti Partai Konservatif dan Partai Buruh (BBC, UK European election results, 2014). Momen tersebut merupakan yang pertama dalam sejarah sejak 1906 dimana ada partai selain Partai Konservatif dan Partai Buruh yang memenangkan pemilihan umum. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Miliband, kebangkitan partai *euuroseptic* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Cameron menggunakan referendum sebagai alat untuk memenangkan pemilu.

Sementara itu, Perancis dan Jerman memperingatkan Inggris bahwa ia tidak dapat memilih untuk keluar dan tinggal dalam skema Uni Eropa sesuka hati. Berdasarkan survei yang dilansir oleh Ipsos Mori menyatakan bahwa masyarakat Eropa memperkirakan bahwa referendum Uni Eropa yang diadakan di Inggris akan membawa efek domino berupa ancaman dan kerugian pada Uni Eropa (Pritchard, 2016). Di sisi lain, wacana referendum ini diterima dengan sangat baik oleh pihak-pihak *eurosceptic* yang menganggap bahwa momen inilah yang mereka tunggu untuk dapat mencopot keanggotaan Inggris di Uni Eropa.

Sebelum pelaksanaan pemilu, Partai Konservatif kembali menegaskan komitmennya untuk melaksanakan referendum keanggotaan Inggris di Uni Eropa sebelum tahun 2017 melalui manifesto politiknya:

“It will be a fundamental principle of a future Conservative Government that membership of the European Union depends on the consent of the British people—and in recent years that consent has worn wafer-thin. That’s why, after the election, we will negotiate a new settlement for Britain in Europe, and then ask the British people whether they want to stay in the EU on this reformed basis or leave ... We will hold that in-out referendum before the end of 2017 and respect the outcome.” (The Conservative Party 2015).

Berdasarkan manifesto politik tersebut, Partai Konservatif percaya bahwa Uni Eropa perlu melakukan perubahan dan masyarakat Inggris memiliki legitimasi penuh untuk memutuskan hal ini melalui mekanisme referendum yang telah ditawarkan oleh partai tersebut. Selain komitmen untuk melakukan referendum, Partai Konservatif juga memiliki beberapa komitmen lain terkait hubungan antara Inggris dan Uni Eropa. Partai tersebut berjanji untuk tidak terlibat dalam skema euro dan bertahan dengan mata uang poundsterling, mereformasi mekanisme kerja

Uni Eropa yang dianggap terlalu besar dan sangat birokratis, mengambil kembali kekuasaan yang selama ini direnggut oleh mekanisme tersebut dan mengamankan kepentingan nasional Inggris dalam skema pasar tunggal, melindungi pelaksanaan bisnis guna menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dengan melakukan kesepakatan perdagangan dan mengurangi regulasi bisnis (*red tape*) yang berlebihan (The Conservative Party, 2015).

Pemilu pada tahun tersebut kemudian mengantarkan Partai Konservatif memegang kendali pemerintahan dengan keberhasilan mereka dalam memperoleh mayoritas suara sebesar 36.9% (BBC, Results , 2015). Kemenangan ini menandakan adanya kepastian penyelenggaraan referendum keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Pada tanggal 27 Mei 2015, wacana referendum ini secara resmi menjadi sebuah agenda yang pasti akan dijalankan dengan tercantumnya persoalan ini dalam pidato pertama Ratu Inggris (*The Queen's Speech*) pada periode parlemen baru yang menyatakan bahwa:

“My Government will renegotiate the United Kingdom’s relationship with the European Union and pursue reform of the European Union for the benefit of all Member States. Alongside this, early legislation will be introduced to provide for an in/out referendum on membership of the European Union before the end of 2017.” (Parliament 2015)

Sehari setelahnya, *European Union Referendum Act 2015* yang merupakan prasyarat legal pelaksanaan referendum diajukan ke Parlemen oleh Philip Hammond selaku Menteri Luar Negeri dan politisi Partai Konservatif. Rancangan Undang-Undang ini berada di bawah undang-undang *Political Parties, Elections and Referendums Act 2000* yang menetapkan aturan bagi partai politik, pemilihan

umum, dan referendum di Inggris. *European Union Referendum Act 2015* merupakan sebuah mekanisme pelaksanaan referendum yang didalamnya harus mencakup informasi terkait waktu pelaksanaan referendum, pertanyaan yang diberikan dalam referendum, mekanisme kampanye bagi kedua pihak yang memilih untuk tetap (*remain*) atau keluar (*leave*) dari Uni Eropa, dan siapa saja yang berhak untuk memilih dalam referendum tersebut (Foreign and Commonwealth Office, 2015).

Setelah dilakukan berbagai kajian dari pihak *House of Commons*, maka Rancangan Undang-Undang tersebut lolos dalam voting yang dilaksanakan di *House of Commons* dengan perbandingan 544-43 dengan dukungan mayoritas dari anggota parlemen Partai Buruh sebesar 491 (Batchelor & Little, 2015). Setelah lolos di *House of Commons*, rancangan undang-undang tersebut kemudian dikaji oleh *House of Lords* pada tanggal 13 Oktober 2015. Pada kesempatan tersebut, terdapat beberapa amandemen terkait dengan hal-hal teknis dalam pelaksanaan referendum. Hal-hal tersebut meliputi adanya perluasan hak pilih bagi masyarakat yang berumur 16 dan 17 tahun, pembatasan bagi donasi dan pinjaman terkait dengan kampanye yang dilakukan oleh partai politik, penentuan masa referendum setidaknya 10 minggu, adanya kewajiban bagi Menteri Luar Negeri yang meliputi laporan terkait dengan hasil negosiasi dengan Uni Eropa, pandangan pemerintah, serta hak dan kewajiban yang timbul dari negosiasi tersebut. Selain itu, *House of Lords* memberikan legitimasi bagi *Electoral Commission* selaku badan pemerintah tunggal yang berkewajiban menyelenggarakan pemilu dan referendum untuk memilih satu badan organisasi kampanye dan memperluas lingkup hal-hal yang

harus dilaporkan dalam kampanye (Uberoi, 2015). Setelah itu, kedua belah pihak yakni *House of Commons* dan *House Lords* melakukan perdebatan terkait dengan rancangan undang-undang sebelum diresmikan sebagai *the act of parliament*. Pada tanggal 17 Desember 2015, *The European Union Referendum Act* menerima *royal assent* yang artinya rancangan undang-undang ini secara resmi telah disahkan oleh Ratu Inggris menjadi sebuah undang-undang.

Pada tanggal 20 Februari 2016, David Cameron mengumumkan bahwa referendum bersejarah itu akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2016. Ia juga memberi kebebasan bagi para anggota parlemen dan anggota kabinetnya untuk memilih opsi keluar atau tetap di Uni Eropa. Cameron menyarankan para pemilih untuk benar-benar berpikir dengan baik terkait dengan pilihan yang akan mereka ambil karena keputusan yang ada kelak akan menjadi salah satu yang terpenting dalam sejarah negara Inggris. Cameron juga memberikan pernyataan bahwa meskipun masyarakat diberikan legitimasi untuk memutuskan masa depan Inggris di Uni Eropa, ia tetap merekomendasikan masyarakat untuk berada dalam kubu *remain* atau tetap berada dalam skema Uni Eropa. David Cameron percaya bahwa Inggris akan lebih aman, lebih kuat, dan lebih baik berada dalam skema Uni Eropa (Cameron, PM statement following Cabinet meeting on EU settlement: 20 February 2016, 2016).

B. Upaya Renegosiasi Hubungan antara David Cameron dengan Uni Eropa

Pasca adanya kepastian dari pemerintah untuk menyelenggarakan referendum keanggotaan Inggris di Uni Eropa yang diumumkan pada tahun 2013, David Cameron sebagai Perdana Menteri yang mendukung Inggris untuk tetap berada dalam skema Uni Eropa memiliki visi untuk melakukan renegosiasi hubungan antara Inggris dan organisasi tersebut sebelum pelaksanaan referendum. Hal ini dilakukan guna mencapai titik tengah yang memuaskan bagi keseluruhan organisasi dan tidak bertentangan dengan identitas, kepercayaan, dan kepentingan nasional negara Inggris. Renegosiasi hubungan ini sekaligus menjadi modal berharga dalam kampanye kubu *remain* yang digawangi oleh Cameron dan Pemerintah Inggris guna mencegah upaya kubu *leave* mengeluarkan negara tersebut dari Uni Eropa.

Upaya Cameron untuk melakukan renegosiasi hubungan ini direspon dengan pesimis dari masyarakat Inggris. Pada tahun 2014, hasil survei menyatakan bahwa 40% masyarakat Inggris menyatakan bahwa mereka 'tidak terlalu percaya' dan 29% menyatakan bahwa mereka 'tidak percaya sama sekali' jika Cameron dapat memperoleh hasil negosiasi yang baik dengan para pejabat tinggi di Uni Eropa. Sementara pada rentang waktu dua tahun selanjutnya, pandangan masyarakat secara umum tetap sama dengan 'tidak terlalu percaya' meraih porsi yang dominan dalam hasil survei tersebut (Ipsos MORI, 2016). Terlepas dari opini yang

berkembang di lapangan, Cameron tetap berupaya melakukan renegosiasi dengan Uni Eropa.

Sebelum adanya renegosiasi, Cameron menulis surat pada Presiden Dewan Uni Eropa, Donald Tusk, terkait dengan tujuan dan arah negosiasi yang akan dilakukan. Dalam surat tersebut, Cameron memfokuskan perhatian pada empat area kerjasama: kedaulatan, dan imigran, tata kelola ekonomi, dan daya saing (House of Commons, 2015). Selain itu, Cameron berharap bahwa surat tersebut dapat memberikan basis yang jelas guna mencapai kesepakatan yang ‘mengikat secara hukum dan tidak dapat diubah, serta jika perlu memiliki kekuatan melawan traktat yang telah disahkan’ (Cameron, PM letter to President of the European Council Donald Tusk, 2015) (lih. Lampiran 2).

Dalam suratnya, Cameron menggugat empat hal:

1. Kedaulatan

Cameron meminta agar Inggris diizinkan untuk melakukan *opt-out* secara permanen terkait dengan ambisi Uni Eropa untuk membentuk *ever close union* bagi negara-negara anggota. Keinginan ini merupakan upaya menghindari integrasi politik yang lebih dalam dan memastikan bahwa opsi *opt-out* ini merupakan pilihan yang formal, diakui secara hukum, dan tidak dapat diubah kembali. Selain itu, Inggris menginginkan adanya kekuasaan yang lebih besar bagi parlemen nasional negara-negara anggota untuk dapat membatalkan kebijakan Uni Eropa.

2. Imigran

Dalam suratnya tersebut, dan sebagaimana telah tercantum dalam manifesto Partai Konservatif, Cameron menginginkan bahwa imigran yang datang ke Inggris harus tinggal dan berkontribusi bagi negara Inggris selama empat tahun sebelum dapat melakukan klaim terkait kredit pajak, tunjangan anak, dan perumahan rakyat. Selain itu, Cameron menginginkan penghapusan tunjangan bagi imigran yang ingin mencari pekerjaan. Terdapat aturan baru lainnya yakni imigran yang datang ke Inggris tidak berhasil memperoleh pekerjaan dalam jangka waktu enam tahun, maka mereka harus meninggalkan Inggris. Cameron juga berusaha untuk menghapuskan tunjangan bagi anak imigran yang tinggal di luar Inggris meskipun mereka sudah membayar pajak.

3. Tata Kelola Ekonomi Terkait Zona Euro

Cameron menginginkan adanya pengakuan secara eksplisit bahwa euro bukanlah satu-satunya mata uang yang berlaku di Uni Eropa sehingga tidak ada diskriminasi bagi negara-negara di luar zona euro. Ia juga menginginkan adanya jaminan bahwa integrasi finansial yang lebih dalam di masa yang akan datang tidak berlaku bagi negara-negara anggota non-euro serta Inggris tidak akan berkontribusi dalam memberikan *bailout* terkait dengan krisis di zona euro.

4. Daya Saing

Keinginan untuk mengurangi ‘beban’ dari regulasi yang berlebihan serta memperluas jangkauan pasar tunggal.

Pada tanggal 17-18 Desember 2015 dalam sebuah pertemuan Dewan Uni Eropa, Cameron menginisiasi diskusi terkait dengan referendum Inggris. Pada

kesempatan itu, terdapat perdebatan yang substantif dan konstruktif terkait dengan rencana referendum sekaligus dengan renegotiasi hubungan yang diajukan oleh Cameron. Namun, pertemuan tersebut tidak mencapai solusi yang memuaskan bagi Uni Eropa dan Inggris sehingga diskusi terkait isu ini akan dilanjutkan pada pertemuan Dewan Uni Eropa selanjutnya pada bulan Februari 2016.

Pada tanggal 18 dan 19 Februari 2016, negosiasi kembali berlanjut yang bertempat di Brusel dalam sebuah sesi Dewan Uni Eropa tersebut disetujui oleh 27 negara anggota Uni Eropa lainnya. Beberapa kesepakatan berhasil dicapai oleh Cameron atas Dewan Uni Eropa dan memberikan status spesial bagi keanggotaan Inggris apabila hasil referendum memutuskan bahwa Inggris tetap berada di Uni Eropa. Poin-poin kesepakatan tersebut terdiri atas:

1. Terkait dengan kedaulatan, kesepakatan tersebut menyatakan bahwa:

"It is recognised that the United Kingdom, in the light of the specific situation it has under the Treaties, is not committed to further political integration into the European Union. The substance of this will be incorporated into the Treaties at the time of their next revision in accordance with the relevant provisions of the Treaties and the respective constitutional requirements of the Member States, so as to make it clear that the references to ever closer union do not apply to the United Kingdom." (Publication Office of the European Union 2016)

David Cameron berhasil mengeluarkan Inggris dari komitmen *ever closer union* dimana perjanjian-perjanjian Uni Eropa terkait hal ini akan diamandemen dan akan memberikan pengecualian bagi Uni Eropa. Ia juga menegosiasikan

penggunaan mekanisme ‘kartu merah’ dimana apabila 55% parlemen negara anggota setuju, mereka dapat melakukan veto pada proposal kerjasama yang diajukan oleh *European Commission*. Namun, penggunaan ‘kartu merah’ secara skeptis masih menjadi tanda tanya. Mekanisme yang selama ini sudah dikenal yakni ‘kartu kuning’ hanya pernah digunakan sebanyak dua kali. Selain itu, beberapa kesepakatan juga berhasil ditetapkan, seperti tidak adanya repatriasi dalam hukum sosial dan ketenagakerjaan Uni Eropa serta tidak ada perubahan terkait dengan ketentuan jam kerja. Meskipun telah berhasil mengamankan beberapa kesepakatan diatas, kaum *euroseptic* menyatakan bahwa kesepakatan diatas belum berhasil mengembalikan kontrol secara penuh ke tangan Inggris.

2. Terkait dengan imigran dan tunjangan kesejahteraan, dalam kesepakatan tersebut menyatakan bahwa:

Terkait tunjangan kerja:

“The Council would authorise that Member State to limit the access of newly arriving EU workers to non-contributory in-work benefits for a total period of up to four years from the commencement of employment. The limitation should be graduated, from an initial complete exclusion but gradually increasing access to such benefits to take account of the growing connection of the worker with the labour market of the host Member State. The authorisation would have a limited duration and apply to EU workers newly arriving during a period of 7 years.” (Publication Office of the European Union 2016)

Terkait tunjangan anak:

“A proposal to amend Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council on the coordination of social security

systems in order to give Member States, with regard to the exportation of child benefits to a Member State other than that where the worker resides, an option to index such benefits to the conditions of the Member State where the child resides. This should apply only to new claims made by EU workers in the host Member State. However, as from 1 January 2020, all Member States may extend indexation to existing claims to child benefits already exported by EU workers. The Commission does not intend to propose that the future system of optional indexation of child benefits be extended to other types of exportable benefits, such as old-age pensions;” (Publication Office of the European Union 2016)

Cameron harus berkompromi dengan Polandia dan negara-negara di Eropa Tengah. Inggris berhasil mendapatkan ‘rem darurat’ (*emergency brake*) selama empat tahun terkait dengan tunjangan kerja. Rem darurat tersebut akan berlaku maksimal selama tujuh tahun yang notabene memiliki jangka waktu lebih pendek dari 13 tahun yang diinginkan Cameron.

Cameron gagal menegosiasikan proposal awalnya untuk membuat peraturan yang melarang pekerja imigran untuk mengirim tunjangan anak ke negara asalnya. Sebagai gantinya, tunjangan tersebut akan disesuaikan dengan estimasi biaya hidup di negara tempat anak tersebut tinggal. Peraturan baru ini akan diimpelentasikan bagi imigran yang baru datang and bagi 34.000 orang dari tahun 2020.

Pemerintah Inggris sendiri sudah mencapai kesepakatan dalam tunjangan kerja. Imigran asal Uni Eropa yang baru datang ke Inggris tidak akan bisa mengklaim tunjangan pencari kerja selama tiga bulan. Apabila mereka tidak mendapat pekerjaan dalam jangka waktu enam bulan maka mereka harus meninggalkan Inggris. Imigran asal Uni Eropa yang menetap di Inggris dan

kehilangan pekerjaan akan menerima tunjangan yang sama dengan masyarakat Inggris termasuk tunjangan pencari kerja dan tunjangan rumah selama enam bulan.

3. Terkait dengan Tata Kelola Ekonomi, kesepakatan yang dicapai adalah:

“The language on monetary union was unchanged. On financial regulation, this line was added: “The single rulebook is to be applied by all credit institutions and other financial institutions in order to ensure the level-playing field within the internal market.” (Publication Office of the European Union 2016).

David Cameron berhasil memenangkan tuntutan terkait dengan jaminan bagi negara-negara non Uni Eropa untuk tidak memberikan kontribusi di masa yang akan datang serta pengakuan adanya mata uang lain selain euro yang ada di Uni Eropa. Selain itu, tiap negara berhak untuk mengajukan keberatan terkait dengan dampak dari kebijakan di zona euro dalam sebuah diskusi darurat dalam pertemuan Dewan Uni Eropa.

4. Terkait dengan Daya Saing, kesepakatan yang dicapai adalah:

“where feasible burden reduction targets in key sectors, with commitments by EU institutions and Member States” (Publication Office of the European Union 2016).

Uni Eropa mengabdikan tuntutan David Cameron untuk melakukan upaya pengurangan ‘beban’ dari regulasi yang berlebihan di sektor-sektor kunci perekonomian yang kemudian akan dijalankan oleh negara anggota.

Pada kesempatan yang sama, Dewan Uni Eropa juga menyetujui adanya perubahan dalam keanggotaan Inggris di Uni Eropa dengan diakuinya pelaksanaan referendum.

C. Referendum Keanggotaan Inggris di Uni Eropa Tahun 2016

1. Periode Kampanye dalam Referendum

Periode 15 April hingga 23 Juni 2016 merupakan waktu yang secara resmi diagendakan untuk melaksanakan kampanye menjelang referendum. Terdapat dua kubu yang bersaing untuk dapat memenangkan referendum yakni kubu pro *Brexit* atau disebut juga dengan *Leave* dan kubu yang kontra *Brexit* atau disebut juga dengan *Remain*.

Kubu pro *Brexit*. Kubu ini memiliki kampanye resmi yakni *Vote Leave* yang diresmikan oleh *Electoral Commission*. *Vote Leave* ini didirikan pada bulan Oktober 2015 yang merupakan kampanye gabungan dari pihak-pihak yang mendukung *Brexit*. Kubu ini dipimpin oleh Matthew Elliot, pendiri *Taxpayer Alliance* dan Dominic Cummings, mantan penasihat kabinet Partai Konservatif. Berdasarkan dokumen yang berasal dari situs web kubu ini, mereka memilih untuk pro *Brexit* karena ‘pilihan untuk keluar akan menciptakan hubungan yang lebih bersahabat dengan Uni Eropa dan akan lebih aman daripada menyerahkan kekuasaan pada Brusel setiap tahunnya.’

Beberapa pihak lain yang memilih berada di kubu ini adalah beberapa anggota parlemen yang berasal dari partai Konservatif seperti Menteri Pertahanan yang sejak lama menjadi oposisi Cameron, Michael Gove, dan Walikota London,

Boris Johnson. Beberapa anggota kabinet Cameron pada saat itu seperti Menteri Kebudayaan, John Whittingdale, Menteri Dalam Negeri di bidang Ketenagakerjaan dan Manajemen Pensiunan, Duncan Smith, Menteri Irlandia Utara, Theresa Villiers, dan Menteri Ketenagakerjaan, Priti Patel, dan Menteri Energi, Andrea Leadsom juga berada dalam kubu ini.

Selain itu beberapa anggota Partai Buruh dan *United Kingdom Independence Party* (UKIP), *British Democratic Party*, *Britain First*, *British National Party (BNP)*, *Liberal Party*, *Independence from Europe*, *Liberty GB*, *New Communist Party of Britain*, *Communist Party of Britain*, *Respect Party*, *Social Democratic Party*, *Socialist Labour Party*, *Trade Unionist and Socialist Coalition* memilih untuk berada di kubu *leave*. Beberapa kelompok lain yang berada di kubu ini adalah *Grassroots Out*, *Labour Leave*, *Left Leave*, *Trade Union and Socialist Coalition*, *Green Leaves*, dan *Liberal Leave*.

Pada pihak yang berbeda, Kubu *Remain* merupakan kubu dimana Perdana Menteri David Cameron berada begitu pula dengan pemerintah Inggris, pemerintah Skotlandia, pemerintah Wales, dan Pemerintah Gibraltar. Kubu *Remain* ini memiliki kampanye resmi yakni *Britain Stronger in Europe* (BsiE) yang didirikan pada bulan Oktober 2015 dan diresmikan oleh *Electoral Commission*. Kubu ini dipimpin oleh pebisnis Lord (Stuart) Rose dari Monewden dan dijalankan oleh Will Straw.

Pesan utama yang disampaikan oleh BsiE ini adalah Inggris akan 'lebih kuat, lebih baik, dan lebih aman di Uni Eropa' daripada 'hanya sendiri'. Meskipun

kubu ini mengakui bahwa Uni Eropa bukanlah organisasi supranasional yang sempurna, namun kepergian Inggris akan mengancam kedaulatan, keamanan, dan menghilangkan pengaruh Inggris di dunia. Situs web BsiE menyatakan bahwa keanggotaan Inggris di Uni Eropa akan memperkuat perekonomian, memperkuat kepemimpinan Inggris di antara negara-negara lainnya, serta memperkuat keamanan Inggris.

Partai politik dari Britania Raya yang berada di dalam kubu *Remain* ini meliputi mayoritas anggota Partai Konservatif, mayoritas anggota Partai Buruh termasuk pimpinannya yakni Jeremy Corbyn, Partai Hijau Inggris dan Wales, Partai Buruh yang digawangi oleh Alan Johnson, Plaid Cymru, Partai Liberal Demokrat, Partai Wales, dan Partai Hijau Skotlandia, Selain itu sisa anggota kabinet seperti Menteri Ekonomi, Sajid Javid, Menteri Dalam Negeri, Theresa May, Menteri Luar Negeri, Phillip Hammond, Menteri Pendidikan, Nicky Morgan memilih untuk berada dalam kubu ini. Sementara itu kelompok lain yang berada dalam kubu ini diantaranya meliputi *Academics for Europe*, *Business for New Europe*, *Cambridge for Europe*, *Conservatives In*, *Labour In for Britain*, *Universities for Europe*, dan lain-lain.

Kubu *remain* dan *leave* ini didesain oleh *Electoral Commission* sebagai badan publik yang juga berada dibawah *Political Parties, Elections and Referendums Act 2000* untuk kemudian menerima dana sebesar 600.000 poundsterling dan akses publikasi berupa penayangan di stasiun tv dan pamflet gratis. Selain itu, terdapat persyaratan bagi kelompok lain yang ingin melakukan

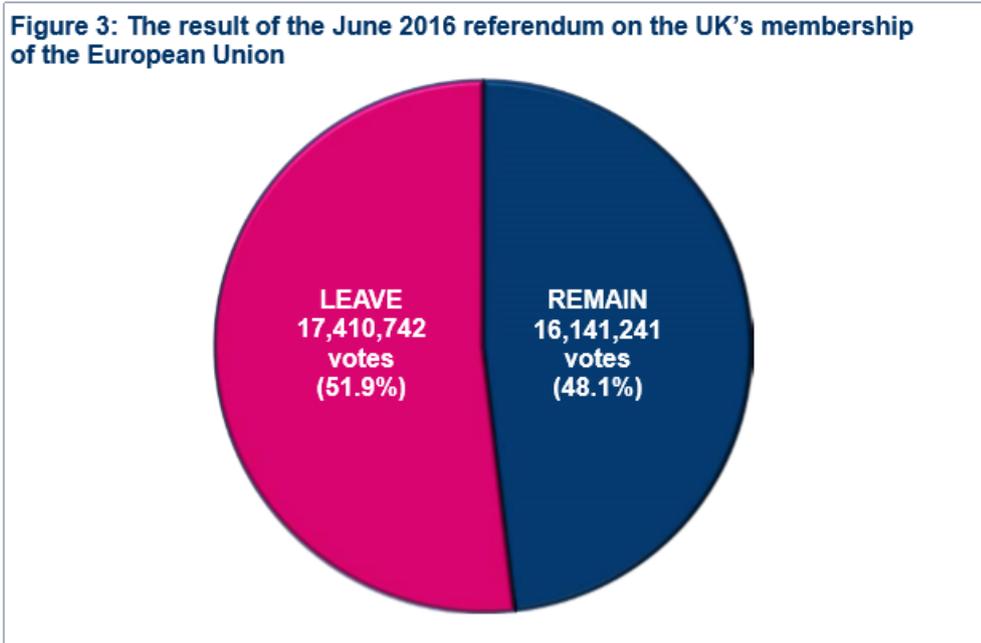
donasi bagi kubu *remain* dan *leave* ini, kelompok-kelompok tersebut diwajibkan untuk mendaftar pada *Electoral Commission*.

2. Hasil Referendum Inggris Tahun 2016

Hasil akhir referendum Inggris terkait keanggotaannya di Uni Eropa diumumkan oleh pada tanggal 24 Juni 2016 oleh pimpinan *Electoral Commission*—sebagai lembaga bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemilihan umum—Jenny Watson di Manchester Town Hall.

Total sebanyak 46.500.001 masyarakat terdaftar dalam referendum ini dan 33.577.342 suara berhasil dikumpulkan, keseluruhan suara ini merepresentasikan 72.2% dari masyarakat yang memilih (*turnout*). Terkecuali Referendum Kemerdekaan Skotlandia pada September 2014, tingkat persentase pemilih dalam referendum Uni Eropa ini merupakan yang tertinggi sejak Pemilihan Umum Parlemen Inggris pada tahun 1992.

Berdasarkan perhitungan kolektif yang terdiri atas 382 daerah pemilihan dari dua belas region, hasil referendum Uni Eropa 2016 ini adalah: 16.141.241 masyarakat (48.1%) memilih Inggris untuk menjadi anggota Uni Eropa sementara 17.410.742 masyarakat (51.9%) memilih Inggris untuk keluar dari Uni Eropa, serta terdapat 25.359 surat suara ditolak (Commission, 2016). Hasil referendum tersebut divisualisasikan sebagai berikut:



Gambar 1. Visualisasi Hasil Referendum Keanggotaan Inggris di Uni Eropa Tahun 2016 (sumber: The Electoral Commission UK)

Berdasarkan visualisasi di atas, dapat dilihat bahwa kubu *leave* memperoleh kemenangan tipis dengan margin 3.8% dari kubu *remain*. Sesuai dengan hasil referendum ini, maka masyarakat Inggris secara resmi memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

Pada tanggal 13 Juli 2016 yang bertepatan dengan tiga minggu pasca pelaksanaan referendum, David Cameron mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Inggris. Pengunduran diri ini merupakan cerminan dari rasa pertanggungjawaban Cameron terkait dengan kegagalannya mencegah Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa meskipun telah melakukan berbagai usaha termasuk renegosiasi hubungan yang memakan waktu cukup lama beberapa bulan sebelumnya. David Cameron kemudian digantikan oleh Theresa May yang juga

berasal dari Partai Konservatif. May yang pada awalnya mendukung kubu *remain* harus melaksanakan mekanisme prosedural untuk mengawal transisi Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa.